

# **STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN 2020**



<https://jakarta.bps.go.id>



# **STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN 2020**



# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN 2020

ISBN	: -
No. Publikasi	: 31520.2010
Katalog Publikasi	: 4601001.31
Ukuran Buku	: B5 (17,6 cm x 25 cm)
Jumlah Halaman	: viii + 42 halaman
Naskah	: Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta
Editor	: Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta
Gambar Kulit	: Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta
Layout	: Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta
Diterbitkan oleh	: © Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta
Dicetak oleh	: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

# Kata Pengantar

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2020 menyajikan gambaran tentang keadaan politik dan keamanan di DKI Jakarta. Secara rinci publikasi mengulas kondisi perpolitikan di Indonesia, mulai dari sejarah dan perkembangan pemilu di Indonesia sejak 1955 sampai 2019 yang mencakup partai peserta pemilu, keterwakilan perempuan dalam politik, jumlah pemilih dalam pemilu, partisipasi masyarakat dalam setiap pemilu serta hasil dari setiap pemilu baik pada Pemilu legislatif maupun Pemilu presiden. Selanjutnya, publikasi juga mengulas Pemilu Kepala Daerah secara Langsung (PILKADA) di DKI Jakarta sejak tahun 2007-2017.

Dari sisi keamanan, publikasi memberikan gambaran keamanan di DKI Jakarta yang meliputi tindak kejahatan baik bentuk maupun jenisnya di tahun 2017 sampai tahun 2019. Selain itu, ada penyelesaian perkara dari tindak kejahatan serta data untuk tindak pengamanan aparat keamanan dan upaya menjaga keamanan dari masyarakat.

Terima kasih disampaikan kepada seluruh tim penyusun publikasi ini atas dedikasi dan sumbangsuhnya kepada negara. Semoga publikasi ini dapat membantu pemerintah DKI Jakarta sebagai pedoman untuk perencanaan pembangunan di bidang politik dan keamanan di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2020  
Badan Pusat Statistik DKI Jakarta  
Kepala,



BUYUNG AIRLANGGA

# Daftar Isi

<b>kata Pengantar</b> .....	<b>III</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>IV</b>
<b>Pendahuluan</b> .....	<b>9</b>
1.1 Latar Belakang .....	9
1.2 Tujuan .....	1
1.3 Jenis Dan Sumber Data .....	10
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
<b>Politik</b> .....	<b>3</b>
2.1 Sejarah Pemilu .....	3
2.2 Partai Peserta Pemilu .....	6
2.3 Keterwakilan Perempuan Dalam Politik .....	10
2.3.1 Jumlah Pemilih .....	11
2.3.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif .....	13
2.3.3 Hasil Pemilu Legislatif .....	16
2.3.4 Komposisi Anggota DPRD DKI Jakarta .....	29
2.3.4.1 Komposisi Kursi DPRD .....	20
2.3.5 Pemilihan Presiden .....	22
2.3.6 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2007, 2012 dan 2017....	25
<b>Kriminalitas</b> .....	<b>34</b>
3.1 Umum .....	34
3.2 Tindak Kejahatan .....	35
3.2.1 Jumlah Kejahatan .....	35
3.2.2 Bentuk Dan Jenis Kejahatan .....	37
3.2.3 Penyelesaian Perkara .....	38
3.2.4 Selang Waktu Terjadinya Tingkat Kejahatan ( <i>Crime Clock</i> ) .....	39
3.2.5 Waktu Kejadian Tindak Kejahatan .....	40

3.3 Tindakan Pengamanan .....	40
3.3.1 Waktu Kejadian Tindak Kejahatan .....	40

<https://jakarta.bps.go.id>

# Daftar Gambar

2.1 Pelaksanaan Pemilu 1995 .....	11
2.2 Persentase Suara DPRD pada Pemilu 2004 - 2009 .....	13
2.3.1 Pelaksanaan Pemilu 2004 .....	14
2.3.2 Pelaksanaan Pemilu 2009 .....	14
2.3.3 Pelaksanaan Pemilu 2014 .....	14
2.3.4 Pelaksanaan Pemilu 2019 .....	14
2.4 Warna Kertas Suara pada Pemilu 2019 .....	15
2.5 Daftar Partai Politik 2004.....	16
2.6 Daftar Partai Politik 2009.....	18
2.7 Daftar Partai Politik 2014 -2019 .....	19
2.8 Persentase Caleg Perempuan & Laki-Laki Pemilu 2004 - 2009... ..	20
2.9 Pendaftaran Pemilih Dilakukan Melalui Kegiatan P4B .....	21
2.10 Golput .....	23
2.11 Partisipasi Masyarakat DKI dalam Pemilihan Legislatif .....	24
2.12 Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2004 - 2019....	29
2.13 Komposisi Kursi DPRD DKI Jakarta.....	29
2.14 Jumlah Anggota DPRD DKI Jakarta Hasil Pemilu 2004 dan 2009 Menurut Jenis Kelamin.....	30
2.15 Angka Partisipasi Pemilih pada Pilpres 2004 - 2019.....	33
2.16 Lambang KPU Provinsi DKI Jakarta .....	37
2.17 Calon Gubernur DKI Jakarta .....	38
2.18 Pilkada DKI Jakarta.....	39
3.1 Jumlah Kejahatan di DKI Jakarta Tahun 2017-2019.....	46
3.2 Crime Clock 2017 - 2019 .....	48
3.3 Upaya Menjaga Keamanan.....	50

# Daftar Tabel

<b>Tabel 2.1</b> Jumlah Partai Peserta Pemilu Selama Tahun 2004-2009.....	8
<b>Tabel 2.2</b> Jumlah Partai Peserta Pemilu Selama Tahun 2014 – 2019.....	9
<b>Tabel 2.3</b> Jumlah Pemilih pada Pemilu Legislatif 2004, 2009, 2014, dan 2019 DKI Jakarta.....	13
<b>Tabel 2.4</b> Persentase Suara DPRD pada Pemilu 2004 – 2009.....	18
<b>Tabel 2.5</b> Persentase Suara DPRD pada Pemilu 2014 – 2019.....	19



<https://jakarta.bps.go.id>

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kemajuan bangsa dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan di berbagai sendi kehidupan termasuk politik dan keamanan. Politik dan keamanan merupakan salah satu sendi pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terciptakan kehidupan berpolitik yang bebas akan memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Terjaminnya keamanan bagi setiap warga, turut pula memicu partisipasi konstruktif masyarakat dalam pembangunan.

Stabilitas politik dan keamanan yang tercipta akan menggerakkan sektor perekonomian sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang positif. Salah satu hal pokok untuk menarik investor asing adalah adanya jaminan politik dan keamanan terhadap investasi mereka.

Pemerintah telah berupaya keras untuk menciptakan kondisi politik dan keamanan yang kondusif bagi terciptanya pembangunan. Untuk melihat sejauh mana kondisi politik dan keamanan yang terjadi di DKI Jakarta, disusun publikasi Statistik Politik dan Keamanan di DKI Jakarta Tahun 2020.

## 1.2 Tujuan

Publikasi ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan gambaran tentang keadaan politik dan keamanan

di DKI Jakarta

2. Memberi masukan bagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk perencanaan pembangunan selanjutnya.

### **1.3 Jenis dan Sumber Data**

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan DKI Jakarta Tahun 2020 menyajikan informasi dalam bentuk ulasan dan tabel-tabel. Pada setiap bab disertakan ulasan singkat untuk membantu pembaca menangkap gambaran yang disajikan dalam bab yang bersangkutan.

Sumber data berasal dari instansi terkait seperti Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi DKI Jakarta.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Publikasi ini dikelompokkan dalam 4 bagian yaitu pendahuluan, politik, keamanan, dan lampiran. Pendahuluan mengurai tentang latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, jenis dan sumber data serta sistematika penulisan. Bagian politik mengulas tentang partai politik, keterwakilan perempuan dalam politik, hasil pemilu dan hasil pilkada.

Bagian tiga akan membahas tentang kondisi keamanan di DKI Jakarta. Sedangkan dibagian akhir adalah lampiran tabel-tabel pendukung.

# POLITIK

## 2.1 Sejarah Pemilu



Pemilihan umum (Pemilu) pertama kali di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 sesuai Maklumat X (Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta) tanggal 3 November 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan pada bulan Januari 1946. Namun pada kenyataannya, Pemilu pertama baru dapat terlaksana pada tahun 1955 dengan dua tahap pelaksanaan yakni tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante.

Pemilu 1955 diikuti oleh lebih dari 30 partai. Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Bahkan meskiyangmenjadicalon

anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih.

Pemilu kedua yang dilaksanakan bangsa Indonesia adalah Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 1971. Ini merupakan pemilu pertama setelah Orde Lama tumbang. Pergantian Presiden dari Soekarno ke Soeharto pada Sidang Istimewa MPRS 1967 kala itu, tidak diikuti dengan penyelenggaraan pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan.

Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada era orde baru, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Satu perbedaan yang nyata dari pemilu-pemilu sebelumnya adalah jumlah peserta pemilu yang sangat sedikit. Pemilu hanya diikuti oleh 2 partai politik (parpol) dan 1 Golongan Karya (Golkar). Penyederhanaan jumlah partai terjadi setelah dikeluarkannya UU No 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Pemilu pada masa orde baru selalu dimenangkan oleh Golkar, sehingga kekuasaan eksekutif dan legislatif di bawah kendali Golkar.

Banyak penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah selama masa orde baru telah memicu gelombang protes dari mahasiswa. Pada tahun 1998, didahului dengan unjuk rasa mahasiswa, gelombang reformasi berhembus dengan kencang. Keadaan ini telah memaksa pemerintah untuk memajukan jadwal Pemilu dari yang seharusnya tahun 2002 menjadi tahun 1999. Pemilu 1999 dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999.

Setelah Pemilu 1971, Pemilu 1999 merupakan pemilu yang diikuti oleh banyak partai. Hal ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Pemilu berikutnya dilaksanakan pada tahun 2004 dan 2009. Sejak tahun 2004, pemilu dilaksanakan dua kali yaitu Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden secara langsung.



*Gambar2.3.1 Pelaksanaan Pemilu 2004*



*Gambar 2.3.2 Pelaksanaan Pemilu 2009*



*Gambar 2.3.3 Pelaksanaan Pemilu 2014*



*Gambar 2.3.5 Pelaksanaan Pemilu 2019*

Sumber: Google



*Gambar 2.4 Warna Kertas Suara Pada Pemilu 2019*

Sumber: Google

Pemilu 2014 menjadi pemilu yang diikuti partai paling sedikit setelah reformasi, dimana terdapat 12 partai nasional yang mengikuti pemilu kali ini dan hanya sepuluh partai yang masuk ke parlemen. Sedangkan pemilu 2019 untuk pertama kalinya diberlangsungkan secara bersamaan antara pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan pemilihan anggota Legislatif.

## **2.2 Partai Peserta Pemilu**

Seperti yang telah disinggung di bagian terdahulu, bahwa jumlah partai peserta pemilu pada masa orde baru mengalami penciutan menjadi 2 partai dan 1 golongan karya. Setelah era reformasi, pemilu yang dilaksanakan di Indonesia menjadi pemilu multi partai.

























Penyelenggaraan Pemilu 1999, diawali dengan diterbitkannya Undang-undang No 2 tahun 1999 tentang partai politik dan Undang-Undang No 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum. Dalam UU No 2 tahun 1999, disuratkan tentang



kemudahan pembentukan partai politik. Partai politik dapat dibentuk sekurang- kurangnya oleh 50 orang warga Negara Indonesia yang sudah berusia 21 tahun. Dengan dibukanya keran kebebasan pendirian partai politik, memicu menjamurnya pembentukan partai politik.

Partai politik yang sudah berdiri tidak otomatis menjadi peserta pemilu. Ada persyaratan-persyaratan khusus yang ditetapkan bagi partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu. Persyaratan tersebut tertuang dalam Bab VII pasal 39 dan 40 undang-undang No 3 tahun 1999. Jumlah partai politik peserta pemilu tahun 1999 sebanyak 48 partai yang terdiri dari 2 partai lama dan 46 partai baru.

**DAFTAR PARNPOL PESERTA PEMILU 2004**

<p><b>1</b></p> <p>Partai Nasional Indonesia Muhammadiyah (PNI Muhammadiyah)</p>  <p>Ketua : Saefudin Sekretaris : Idris Riyadi Bendahara : Fauzi Himpunan : Alimul Huda Dr. Kalsaidin ST 7 RW 3 Kecamatan Babak</p>	<p><b>2</b></p> <p>Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD)</p>  <p>Ketua : H. Muband Nur Agay Sekretaris : Drs. H. Abdurrahman Bendahara : M. Sutopo SE Perumida Datas C6 W/ 17 Telp. (0322) 321329</p>	<p><b>3</b></p> <p>Partai Bulan Bintang (PBB)</p>  <p>Ketua : H. Muband Nur Agay Sekretaris : Drs. H. Abdurrahman Bendahara : M. Sutopo SE Jl. Kumbayanti M. Duriyat 36 Telp. (0322) 321823 Lmg.</p>	<p><b>4</b></p> <p>Partai Merdeka</p>  <p>Ketua : Muchlisin Sekretaris : Dr. Huk Yuwono Bendahara : H. Jazid Alimul Huda Jl. Raday Wirya 31 Sekeloa2 Telp. (0322) 320047</p>	<p><b>5</b></p> <p>Partai Perubahan Pembangunan (PPP)</p>  <p>Ketua : H. M. Saiful Sekretaris : M. Nizar, SA Bendahara : Kholil Huda, SE Jl. Soekarno No. 83 Lamongan Telp. (0322) 321848</p>	<p><b>6</b></p> <p>Partai Perubahan Demokrasi Kebangkitan (PPDK)</p>  <p>Ketua : Bambang Supriyanto Sekretaris : Nurkhotim, SH Bendahara : Zuhri, Paksiun Alimul Huda Jl. Andhono, No. 15 Lamongan Telp. (0322) 321848</p>
<p><b>7</b></p> <p>Partai Perjuangan Indonesia Baru (PJB)</p>  <p>Ketua : Drs. Alfan Sekretaris : Agus Wicakso Bendahara : Abd. Wajid Mulyono Wakil Ketua : H. Saiful Gini Gg. Beringso Mulya 24 Lmg. Telp. 312240</p>	<p><b>8</b></p> <p>Partai Keadilan Berjuang Kembangkan (PKBK)</p>  <p>Ketua : Eddy Zuhadi, SE Sekretaris : Jaka Dwi S. ABC Bendahara : Tini Sumudiono D. Alimul Huda Jl. Margan No. 83 Lamongan Telp. (0322) 312851</p>	<p><b>9</b></p> <p>Partai Demokrat</p>  <p>Ketua : Arif Rahman Sekretaris : Fachrudin Bendahara : Indonus Sadiyan Alimul Huda Jl. Raya Da' Tarjand 12 Lmg Telp. 0322 320625</p>	<p><b>10</b></p> <p>Partai Keadilan dan Keadulatan Indonesia (PKPI)</p>  <p>Ketua : Hari Yudianto, SE Sekretaris : Nung Darnoko Ah. Bendahara : Yuli Prastowo Jl. Soekarno No. 83 Lamongan Telp. 0322 312851</p>	<p><b>11</b></p> <p>Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia (PPDI)</p>  <p>Ketua : Kanto Supri Perbang Sekretaris : Marufi Bendahara : Supriyanto, SY Jl. HOS Chikriyanto Gg. Samangga Lmg 22122, 322269</p>	<p><b>12</b></p> <p>Partai Perubahan Nasionalis Linniah Indonesia (PUNI)</p>  <p>Ketua : Drs. M. Mahsun, M. Ag Sekretaris : Dwi Mulyono, SH Bendahara : Drs. Abdul Gholiq Jl. Kusuma Bangsa 83 Lmg. Telp. (0322) 322269</p>
<p><b>13</b></p> <p>Partai Amanah Nasional (PAN)</p>  <p>Ketua : H. Nurul Huda, Sg Sekretaris : Drs. Agus Sukhan, MS Bendahara : H. Saiful Huda Alimul Huda Jl. Bakul Kertanadi No. 83 Lmg. Telp. (0322) 324339</p>	<p><b>14</b></p> <p>Partai Negeri Pribumi Bangsa (PNPB)</p>  <p>Ketua : Abdul Fatah, SH Sekretaris : Dwi Ari Huda Wati Wakil Ketua : Jaka Wicakso Jl. Sunan Drajad No. 125 Lamongan</p>	<p><b>15</b></p> <p>Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)</p>  <p>Ketua : Dwi Muband Nur Agay Sekretaris : H. M. Saiful Bendahara : M. M. Saiful Alimul Huda Jl. Sunan Drajad No. 125 Lmg. Telp. (0322) 324781</p>	<p><b>16</b></p> <p>Partai Keadilan Sejahtera (PKS)</p>  <p>Ketua : Budi Setyopriyo Sekretaris : Prof. Saiful Bendahara : Muhammad Haim Alimul Huda Jl. Kuning Indan 22 Lmg. Telp. (0322) 314019</p>	<p><b>17</b></p> <p>Partai Bintang Reformasi (PBR)</p>  <p>Ketua : H. Mulyono, AK Sekretaris : H. Saiful Bendahara : H. Saiful Alimul Huda Jl. Veteran Gg. Ika Bandung 6 Lamongan. (0322) 321859</p>	<p><b>18</b></p> <p>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)</p>  <p>Ketua : H. Saiful Huda, Sg Sekretaris : Supriyanto Bendahara : Supriyanto Alimul Huda Jl. Kusuma Bangsa 83 Lmg. Kartanegara No. 15 Lmg. Telp. (0322) 321843</p>
<p><b>19</b></p> <p>Partai Damai Sejahtera (PDS)</p>  <p>Ketua : Ekan Kusanto Sekretaris : Saiful Bendahara : Ekwanto Alimul Huda Jl. Kusuma Bangsa 25 Lmg. Telp. (0322) 321738</p>	<p><b>20</b></p> <p>Partai Gerakan Karya (PGK)</p>  <p>Ketua : H. Moch. Basdurot Sekretaris : H. M. Saiful Bendahara : Dwi Saiful Huda Wakil Ketua : Alimul Huda Jl. Lembang No. 110 Lmg. Telp. (0322) 321342</p>	<p><b>21</b></p> <p>Partai Politik Pancasila (PPP)</p>  <p>Ketua : Mel Saiful Nugrah Sekretaris : Nurfaidi S. SA Bendahara : Nur Faridhan Alimul Huda Jl. Kuning Indan No. 49 Lmg. Telp. (0322) 324576</p>	<p><b>22</b></p> <p>Partai Sejahtera Indonesia (PSI)</p>  <p>Ketua : Kanto Supri Sekretaris : Ahmad Wito Bendahara : Saiful Alimul Huda Jl. Mardiana Pagarjangan, Pagarjangan Maduran Telp. (0322) 322266</p>	<p><b>23</b></p> <p>Partai Fajar Baru Daerah (PFB)</p>  <p>Ketua : Drs. M. Saiful, M. Saiful Sekretaris : Drs. Alimul Huda Bendahara : Saiful Alimul Huda Jl. Mada Tapan Sebelan No. 23 Telp. (0322) 323234</p>	<p><b>24</b></p> <p>Partai Pelopor</p>  <p>Ketua : Syaifulin Ali Sekretaris : Kholil, SH Bendahara : Yulian Nugrah Alimul Huda Jl. Veteran Gg. Beringso Telp. (0322) 323590, 324336</p>

Dalam UU No 3 tahun 1999 dicantumkan pula aturan bagi keikutsertaan parpol pada pemilu berikutnya. Partai politik yang memperoleh suara minimal 2 persen dapat mengikuti pemilu berikutnya. Hasil Pemilu 1999, jumlah partai yang melampaui *electoral threshold* (ET) sebanyak 6 partai. Beberapa partai yang tidak lolos ET berganti nama berubah menjadi partai baru untuk



ikut pada Pemilu 2004. Jumlah peserta Pemilu 2004 sebanyak 24 partai politik. Berdasarkan UU No 12 tahun 2003, ET meningkat menjadi 3 persen. Jumlah partai yang lolos ET tahun 2004 sebanyak 7 partai. Pada tahun 2009, sebanyak 38 partai mengikuti Pemilu 2009. Jumlah partai peserta pemilu selama tahun 2004-2009 tersaji pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Jumlah Partai Peserta Pemilu Selama Tahun 2004-2009**

Tahun	Partai Yang Lolos <i>Electoral Treshold</i> Pemilu Sebelumnya	Partai Baru	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>2004</b>	6	18	24
<b>2009</b>	7	31	38

Menjelang Pemilu 2014, Undang-Undang (UU) pemilu kembali direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, di mana Pasal 208 menetapkan bahwa ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 3,5%. Pada Pemilu 2014 sebanyak 15 partai politik ikut serta (3 partai politik lokal Aceh), dan yang tidak lolos ke parlemen ada dua partai. Selanjutnya UU pemilu diubah menjadi UU No. 7 Tahun 2017, dengan ketentuan ambang batas parlemen kembali dinaikkan, menjadi 4% dari suara sah nasional.



Gambar 2.6 Daftar Partai Politik 2009

Pada Pemilu 2014 satu-satunya partai politik baru pada saat itu dapat lolos ambang batas parlemen yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Pada pemilu 2019 terdapat partai-partai baru yang menjadi kontestan pemilu kali ini adalah Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA), dan Partai Berkarya.

Tabel 2.2 Jumlah Partai Peserta Pemilu Selama Tahun 2014 - 2019

Tahun	Partai Politik yang ikut Pemilu
2014	12
2019	16

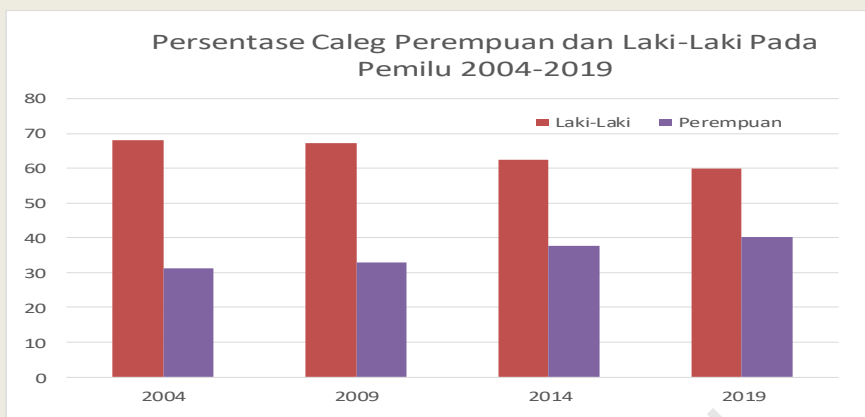


Gambar2.7 Daftar Partai Politik 2014 - 2019

## 2.3 Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Keterwakilan wanita dalam politik masih dirasakan kurang. Perlu adanya wakil yang dapat menyuarakan kepentingan perempuan. Selama ini kehidupan politik di Indonesia termasuk di DKI Jakarta masih didominasi oleh laki-laki. Peran wanita dalam kancah politik dapat dilihat dari calon legislatif yang diusung oleh partai politik. Pada Pemilu Legislatif 2004, jumlah calon legislatif perempuan hanya sebesar 31,09 persen dari total calon legeslatif sebanyak 1.557 orang. Pada Pemilu 2009, persentase calon legeslatif perempuan mengalami sedikit peningkatan menjadi 32,85 persen dari total caleg sebanyak 2.268 orang. Keterwakilan perempuan dalam politik ditetapkan pula dalam dalam UU No 10 tahun 2008.

Pada pasal 8, disebutkan bahwa salah satu persyaratan partai peserta pemilu adalah menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Hal ini bukan saja sebagai bentuk dorongan kepada kaum perempuan untuk berpolitik, tapi juga sebagai jaminan kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk dipilih dalam pemilu. Pada pemilu 2014 calon legislatif meningkat yaitu menjadi 37% dari total 6.607 Caleg. Sementara pada Pemilu 2019, persentase keterwakilan perempuan mencapai 40,08 persen, yakni ada 3.200 perempuan dari 7.985 caleg yang memperebutkan 575 kursi DPR.



*Gambar 2.8 Persentase Caleg Perempuan dan Laki-Laki Pemilu 2004 - 2009*

### **2.3.1 Jumlah Pemilih**

Pada pemilu-pemilu sebelumnya, pendaftaran pemilih dilakukan oleh aparat kelurahan. Penduduk akan didaftarkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk. Sehingga, setiap pelaksanaan pemilu akan terjadi arus mudik khususnya bagi penduduk di DKI Jakarta yang masih ber-KTP daerah.

Pemerintah sebagai penyelenggara pemilu melakukan perubahan yang cukup mendasar dalam mendata jumlah pemilih yaitu dengan menugaskan BPS untuk melakukan pendataan jumlah pemilih. Melalui kegiatan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B), disusun data pemilih untuk Pemilu tahun 2004 dan data ini dapat dimutakhirkan untuk pemilu selanjutnya. Dengan sistem pendataan yang baru, masyarakat tidak harus memilih di daerah yang tercantum dalam KTP. Mereka dapat memilih di lokasi tempat mereka terdaftar karena P4B tidak mengacu pada aspek administrasi penduduk.



Berdasarkan UU Pemilu No 12 tahun 2004, pemutakhiran daftar pemilih dilaksanakan oleh KPUD setempat. KPUD bekerja sama dengan aparat pemerintah daerah yang terkait melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Ujung tombak di lapangan adalah ketua RT setempat. Jumlah pemilih pada Pemilu 2004 dan 2009 tersaji pada Tabel 2.2.



Pada Pemilu 2004, jumlah pemilih tercatat sebanyak 6,7 juta jiwa. Jumlah pemilih pada Pemilu 2009 mengalami peningkatan menjadi 7,03 juta jiwa.

*Gambar 2.9 Pendaftaran Pemilih Dilakukan oleh Petugas BPS Melalui Kegiatan P4B*

Sumber : Google

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 mencapai 75,11 persen. Dengan angka partisipasi itu, 24,89 persen pemilih tak menggunakan hak pilihnya. Tercatat jumlah pemilih di DKI pada tahun 2014 yaitu sebanyak 7.034. 061 jiwa. Pada tahun 2019 jumlah pemilih meningkat signifikan yaitu sebanyak 7.761.598 jiwa. Penjabaran untuk per wilayah kota tertera pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3 Jumlah Pemilih pada Pemilu Legislatif 2004, 2009, 2014, dan 2019 DKI Jakarta**

Kabupaten/Kota	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Kepulauan Seribu</b>	15.001	18.802	16.312	19.013
<b>Jakarta Selatan</b>	1.447.048	1.518.226	1.482.160	1.694.316
<b>Jakarta Timur</b>	1.883.484	2.037.389	1.984.811	2.246.279
<b>Jakarta Pusat</b>	703.480	766.217	774.671	809.975
<b>Jakarta Barat</b>	1.540.505	1.510.293	1.605.755	1.738.262
<b>Jakarta Utara</b>	1.093.464	1.175.845	1.170.406	1.253.753
<b>DKI Jakarta</b>	<b>6.682.982</b>	<b>7.026.772</b>	<b>7.034.061</b>	<b>7.761.598</b>

### 2.3.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Legislatif

Pada tahun 2004 diselenggarakan dua Pemilu yaitu Pemilu Legislatif pada bulan April dan Pemilihan Presiden pada bulan September. Pemilu Legislatif bertujuan untuk memilih wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik tingkat pusat maupun daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Jumlah pemilih yang terdaftar di Jakarta pada Pemilu Legislatif sebanyak 6,7 juta jiwa, namun demikian tidak semua menggunakan hak pilihnya. Angka Partisipasi Pemilih pada Pemilu Legislatif DPR adalah 73,81 persen. Sementara untuk tingkat DPRD sebesar 71,28 persen.

Seperti halnya dengan Pemilu 2004, Pemilu Legislatif 2009 dilaksanakan pada bulan April 2009. Angka partisipasi pemilih Pemilu Legislatif tingkat DPR tercatat sebesar 58,14 persen. Dan Angka Partisipasi Pemilih Pemilu Legislatif tingkat DPRD sebesar 58,13 persen. Jika secara keseluruhan partisipasi masyarakat dalam Pileg di DKI Jakarta 2009 hanya 58,3 persen, sedangkan partisipasi nasional sebesar 71 persen. Angka ini menurun cukup tajam dibandingkan dengan keadaan tahun 2004.

Pemilih di DKI Jakarta merupakan pemilih yang rasional. Ketidaktahuan mereka tentang calon legislatif yang akan dipilihnya dan ketidakpercayaan publik terhadap calon legislatif membuat sebagian pemilih di DKI Jakarta tidak menyuarakan aspirasinya.

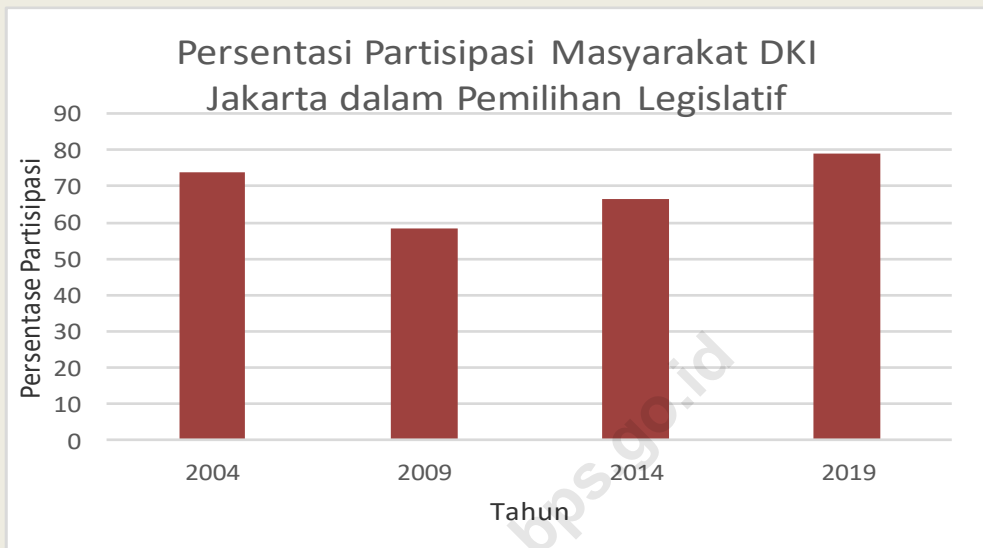


*Gambar2.10 Golput*

Angka Partisipasi Pemilih yang mengalami penurunan pada 2 pemilu terakhir, diikuti dengan peningkatan angka tidak memilih atau sering disebut golput (golongan putih). Pada tahun 2004, angka golput sekitar 30 persen dan meningkat menjadi lebih dari 40 persen pada tahun 2009.

Tingkat Partisipasi masyarakat DKI Jakarta meningkat menjadi 66,5% pada Pileg 2014, meskipun masih berada di bawah nasional yang mencapai 75,1 persen. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 1.272 calon legislatif (Caleg) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Pemilu legislatif (Pileg) 2014. Caleg tersebut bertarung memperebutkan 106 kursi di DPRD DKI Jakarta, paling banyak diantara 32 provinsi lain di Tanah Air. Daerah Kepulauan Seribu, untuk Pemilu 2014, tidak lagi memiliki dapil karena digabungkan dengan Jakarta Utara, yaitu dapil DKI Jakarta 2. Selain itu, kotamadya harus dibelah dua dengan Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, karena jika tidak dibelah alokasi kursi DPRD melampaui 12 kursi. Secara keseluruhan, total jatah kursi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta sebanyak

106 kursi. Pada pemilu 2019 partisipasi pemilu di DKI merupakan yang tertinggi yaitu mencapai 79 persen.



*Gambar 2.11 Partisipasi Masyarakat DKI dalam Pemilihan Legislatif*

Pada masa Orde Baru, memilih adalah kewajiban. Pengabaian atas kewajiban ini sering kali dihadapi dengan represif oleh pemerintah. Setelah era orde baru, memilih adalah sebuah hak. Memilih berhak untuk tidak memilih, golput adalah kalangan yang memilih untuk tidak memilih.

Dalam konteks “memilih sebagai hak”, golput mewakili sebuah spektrum luas dan beragam. Golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tak sah. Golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). Golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan (Saefullah, E. Analisis Politik: Mengelola Golput Jakarta, 24 Juli 2007).



### **2.3.3 Hasil Pemilu Legislatif**

Hasil pemilu pasca reformasi mengukuhkan bahwa masyarakat DKI Jakarta bukanlah loyalis tradisional terhadap partai atau tokoh tertentu. Pemilih di DKI Jakarta merupakan pemilih rasional, namun demikian empati terhadap suatu masalah masih sangat tinggi.

Pada Pemilu 1999, PDI-P telah dapat memerahkan Jakarta. Masyarakat berempati dengan berbagai masalah yang menerpa partai ini. PDI-P dianggap menjadi simbol perjuangan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang demokratis. Pemilu 1999 telah memberikan kekuasaan pada PDI-P untuk memerintah negeri ini. Namun kinerja mereka dianggap buruk oleh masyarakat, sehingga masyarakat memberikan hukuman pada saat Pemilu 2004. PDI-P hanya memperoleh 13 persen suara pada saat Pemilu 2004, jauh menurun dibandingkan perolehan suara mereka pada tahun 1999 yaitu 39 persen.

Pemilu 2004 telah memunculkan partai baru yang fenomenal. Secara nasional, Partai Keadilan Sejahtera menjadi kuda hitam dalam pemilu. Di DKI Jakarta, partai ini menjadi pemenang pemilu dengan perolehan suara mencapai 23 persen. Diikuti oleh Partai Demokrat yang memperoleh sekitar 21 persen suara. PKS merupakan partai yang sangat solid dengan komando dalam tubuh partai sangat efektif. Partai Demokrat yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhono (SBY) mendapat simpatik yang luar biasa dari masyarakat karena figur ketokohan SBY.

Pada Pemilu Legislatif 2009 baik tingkat DPR maupun DPRD, kembali terjadi pergeseran kekuatan politik di DKI Jakarta. Partai Demokrat menjadi pemenang pemilu dengan perolehan suara sekitar 33,58 persen diikuti oleh PKS sekitar 17,23 persen untuk suara DPRD. Dapat dilihat bahwa masyarakat DKI Jakarta masih

menaruh harapan besar pada Partai Demokrat dan PKS untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Komposisi partai yang memperoleh peringkat suara 10 besar, tidak terlalu berbeda dibandingkan dengan hasil Pemilu 2004. Hanya ada 2 partai pada Pemilu 2004 masuk 10 besar, namun pada Pemilu 2009 berada di luar 10 besar yaitu Partai Bintang Reformasi dan Partai Karya Peduli Bangsa. Partai Hanura dan Partai Gerindra adalah dua partai baru yang masuk peringkat 10 besar pada perolehan suara DPRD Pemilu 2009.

Pada Pemilu 2014, persentase DPRD DKI dimenangkan oleh PDIP dengan suara terbanyak 27,67 persen dan disusul Partai Gerindra sebanyak 14,17 persen. Ditingkat nasional, PDIP meraih suara terbanyak dengan jumlah suara mencapai 18,95 persen. Sementara itu, dua partai dinyatakan tidak memenuhi ambang batas parlemen sehingga tidak mendapatkan jatah kursi DPR, yaitu partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Di DPRD DKI Jakarta, ada 106 kursi dari sepuluh dapil yang diperebutkan. Jatah kursi tiap dapil bervariasi antara sembilan hingga 12 tergantung jumlah pemilih. Partai dengan perolehan suara terbesar yakni PDI-P dengan 1.336.344 suara. Kedua, Partai Gerindra dengan 935.793 suara. PKS menyusul dengan 917.005 suara.

**Tabel 2.4 Persentase Suara DPRD pada Pemilu 2004 - 2009**

PEMILU 2004			PEMILU 2009	
No.	Nama Partai	Persentase Suara DPRD	Nama Partai	Persentase Suara DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Partai Keadilan Sejahtera	23,00	Partai Demokrat	33,58
2	Partai Demokrat	21,09	Partai Keadilan Sejahtera	17,23
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13,56	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
4	Partai Golkar	8,30	Partai Golkar	6,47
5	Partai Persatuan Pembangunan	8,15	Partai Gerakan Indonesia Raya	5,16
6	Partai Amanat Nasional	7,15	Partai Persatuan Pembangunan	5,15
7	Partai Damai Sejahtera	5,37	Partai Amanat Nasional	4,17
8	Partai Kebangkitan Nasional	3,30	Partai Damai Sejahtera	3,54
9	Partai Bintang Reformasi	2,99	Partai Hati Nurani Rakyat	2,60
10	Partai Karya Peduli Bangsa	1,83	Partai Kebangkitan Nasional	2,04

**Tabel 2.5 Persentase Suara DPRD pada Pemilu 2014 - 2019**

PEMILU 2014			PEMILU 2019	
No.	Nama Partai	Persentase Suara DPRD	Nama Partai	Persentase Suara DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	27,67	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	22,29
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	14,17	Partai Gerakan Indonesia Raya	15,81
3	Partai Keadilan Sejahtera	9,34	Partai Keadilan Sejahtera	15,55
4	Partai Persatuan Pembangunan	8,96	Partai Solidaritas Indonesia	6,72
5	Partai Golkar	8,45	Partai Demokrat	6,49
6	Partai Hanura	7,39	Partai Amanat Nasional	6,37
7	Partai Demokrat	7,31	Partai Kebangkitan Bangsa	5,47
8	Partai Kebangkitan Bangsa	5,46	Partai Nasional Demokrat	5,2
9	Partai Nasional Demokras	5,23	Partai Golkar	5,09
10	Partai Bulan Bintang	1,42	Partai Persatuan Pembangunan	3,13

## 2.3.4 Komposisi Anggota DPRD DKI Jakarta

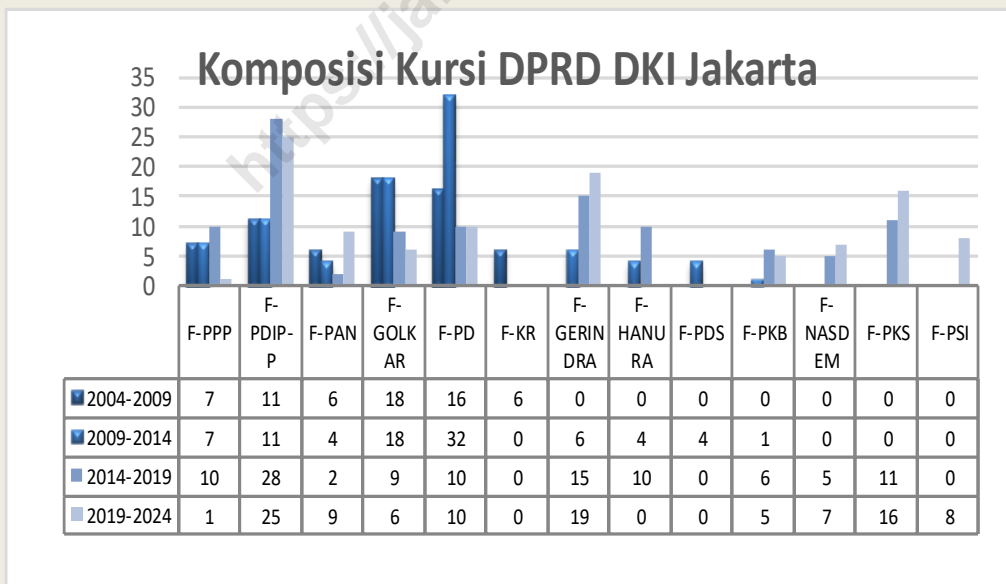
### 2.3.4.1 Komposisi Kursi DPRD



Gambar 2.12 Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2009 – 2014

Sumber: Google

Kemenangan PKS pada Pemilu 2004 telah mengubah komposisi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2004-2009. Komposisi kursi yang dikuasai oleh partai-partai cukup merata. Sebagai pemenang pemilu di DKI Jakarta, PKS menguasai 18 kursi disusul oleh Partai Demokrat (16 kursi), dan Partai Golkar serta PDI-P masing-masing 11 kursi. Sementara itu partai-partai yang tergabung dalam Fraksi Kebangkitan Reformasi (FKR) hanya menguasai 6 kursi.



Gambar 2.13 Komposisi Kursi DPRD DKI Jakarta

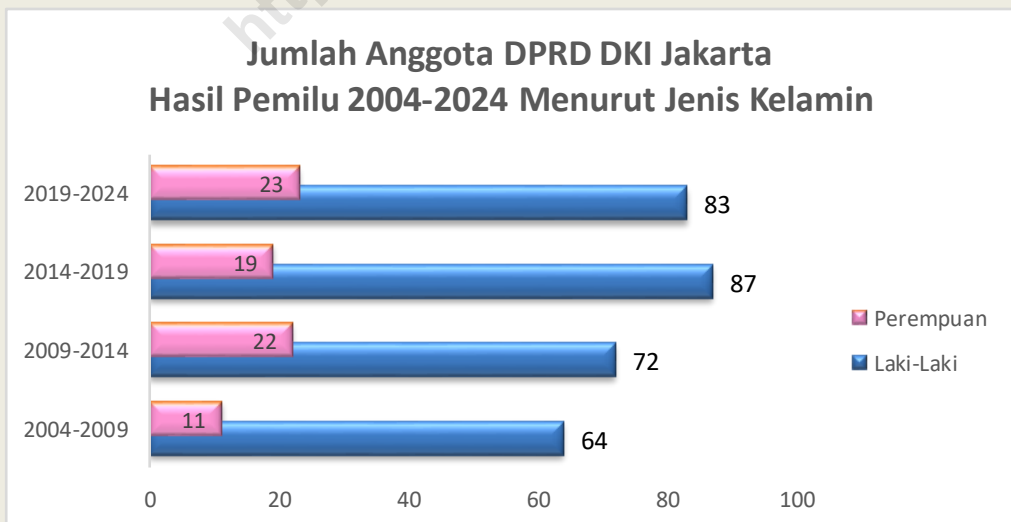
Pada Pemilu 2009, jumlah kursi yang diperebutkan di DPRD DKI Jakarta sebanyak 94 kursi. Penambahan jumlah anggota DPRD DKI Jakarta dari 75 orang menjadi 94 orang didasarkan

pada pertimbangan bahwa di DKI Jakarta tidak terdapat DPRD tingkat II. Komposisi kursi DPRD DKI Jakarta terdiri dari 32 anggota dari F-PD, 18 dari F-PKS, 11 dari F-PDIP, 7 dari F-PG, 7 dari F-PPP, 6 dari Fraksi Gerindra, 4 dari Fraksi Hati Nurani Rakyat, 4 dari F-PDS, 4 dari F-PAN dan 1 dari F-PKB.

Pemilu 2014 komposisi total kursi yang didapat DPRD Provinsi DKI Jakarta sebanyak 106 kursi, dengan PDIP mendapat 27 kursi, Gerindra 14 kursi, PKS 11 kursi, sedangkan partai Hanura, PPP, dan Demokrat menempatkan perwakilannya masing-masing 10 orang, partai Golkar 9 orang, PKB 7 orang, Nasdem 5 orang dan PAN 3 orang. Sementara PBB dan PKPI tidak satupun calonnya yang masuk ke kursi DPRD DKI.

Pemilu 2019, DKI mendapat kursi 106 DPRD Provinsi, dengan yang dimenangkan oleh PDIP dengan jarak yang unggul daripada partai lainnya, sehingga mendapat komposisi kursi sebanyak 25 kursi DPRD, disusul Gerindra mendapat 19 kursi, lalu PKS 16 kursi, Partai Demokrat dengan 10 kursi, PAN dengan 9 kursi, PSI 8 kursi, Partai Nasdem 7 kursi, Partai Golkar 6 kursi, PKB 5 Kursi, dan PPP mendapat 1 kursi.

#### 2.3.4.1.1 Keterwakilan Perempuan di DPRD



Gambar 2.14 Jumlah Anggota DPRD DKI Jakarta Hasil Pemilu 2004 -2024 Menurut Jenis Kelamin

Sumber : KPUD DKI Jakarta

Representasi wanita di DPRD menunjukkan peningkatan. Pada periode 2004-2009, jumlah anggota DPRD perempuan tercatat sebanyak 11 orang atau 14,67 persen. Pada periode 2009-2014, secara absolut jumlah anggota DPRD perempuan meningkat 2 kali lipat menjadi 22 orang atau 23,40 persen. Keterwakilan perempuan pada pemilu 2014, hanya ada 19 orang yang terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Sedangkan pemilu selanjutnya meningkat menjadi 23 orang atau sekitar 21 persen diantara anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 yang ditetapkan merupakan perempuan. Kondisi ini cukup baik bagi perempuan karena semakin banyak anggota DPRD yang peduli dengan perempuan. Suara mereka akan diwakili minimal oleh 23 persen anggota DPRD. Semakin banyak anggota DPRD yang menyuarakan kebutuhan dan hak-hak perempuan.

### **2.3.5 Pemilihan Presiden**

Pemilihan Presiden (Pilpres) bertujuan untuk memilih presiden secara langsung oleh rakyat dan baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2004. Pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung merupakan taruhan bagi kedewasaan berpolitik bangsa Indonesia. Pemilu yang berjalan dengan damai merupakan wujud dari kedewasaan berpolitik tersebut. Oleh karena itu, sebelum berlangsungnya Pemilihan Presiden, KPU melaksanakan deklarasi Pemilu Damai.

Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa Presiden terpilih adalah kandidat yang memperoleh suara 50 persen plus 1. Apabila tidak tercapai pada putaran pertama, akan dilakukan Pilpres putaran kedua. Pada Pilpres 2004, jumlah calon presiden dan wakil presiden yang maju dalam pemilihan sebanyak 5 pasang. Pada putaran pertama Pilpres, angka partisipasi pemilih tercatat sebesar

77,42 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif.

Pemilihan presiden secara langsung yang baru pertama kali dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia, memicu antusias masyarakat untuk turut serta dalam menentukan pemimpin bangsa. Slogan 1 suara menentukan nasib bangsa, dipahami oleh masyarakat Indonesia dengan datang ke TPS untuk mencoblos gambar pimpinan bangsa pilihan mereka.

Secara nasional, hasil Pilpres putaran pertama menunjukkan bahwa tidak ada kandidat calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh persentase 50 persen plus 1. Sesuai dengan ketentuan, maka dilakukan Pilpres putaran dua yang diikuti oleh 2 kandidat calon presiden dengan suara terbanyak pada Pilpres putaran pertama.

Pada Pilpres putaran dua, angka partisipasi pemilih mengalami penurunan yaitu menjadi 74,47 persen. Keadaan ini dapat dimaklumi karena pada saat Pilpres putaran kedua hanya tersisa dua kandidat presiden, sebagian masyarakat tidak memilih karena kandidat calon presiden pilihan mereka tidak bertarung pada putaran kedua. Seperti halnya pada Pemilu Legislatif, persentase pengguna hak pilih yang cukup tinggi menandakan bahwa masyarakat DKI Jakarta mempunyai kesadaran berpolitik yang baik.

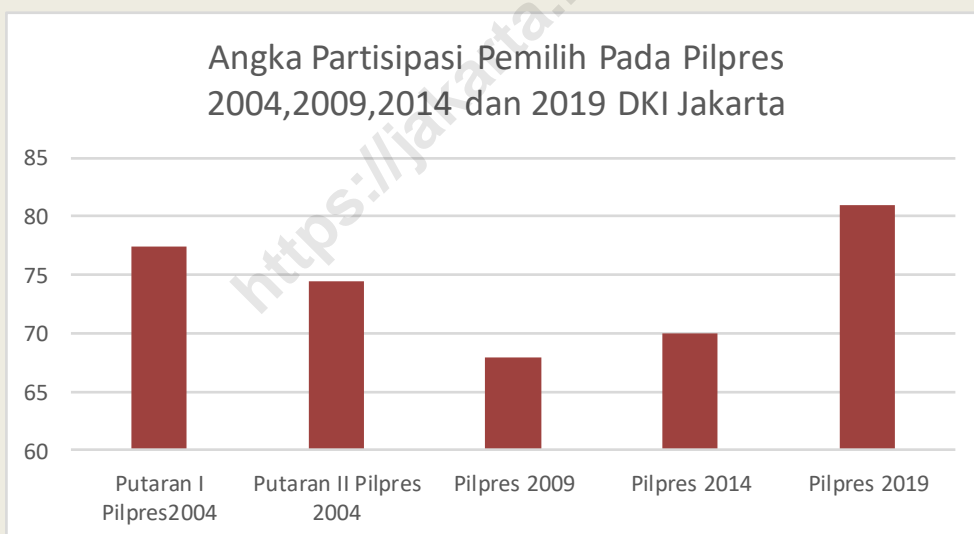
Pilpres 2009 diikuti oleh tiga kandidat calon presiden. Selain memelopori deklarasi Pemilu Damai, KPU melaksanakan perbaikan daftar pemilih tetap untuk Pilpres yang dilaksanakan pada bulan Juli 2009.

Pilpres 2014 terdapat dua kandidat calon presiden. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi



25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, tetapi pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku.

Pilpres 2019 sama halnya dengan 2014 yaitu terdapat dua kandidat, dengan dua nama Capres yang sama namun berbeda wakilnya. Pemilihan ini dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum legislatif yaitu pada Juli 2019. Pada Pilpres 2019 terjadi cukup kontroversi di berbagai sosial media karena banyak perang tagar antara pendukung dua kandidat ini, tagar yang kontroversi yaitu #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode. Walaupun terdapat perselisihan antara dua pendukung kandidat, namun berakhir damai.



*Gambar 2.15 Angka Partisipasi Pemilih Pilpres 2004 - 2019 DKI Jakarta*

Angka partisipasi pemilih meningkat cukup signifikan dibandingkan pada saat Pemilu Legislatif yaitu sekitar 68 persen (Gambar 2.15). Angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2004 yang mencapai 77,42 persen.

Pada tahun 2004, euforia pemilihan presiden secara langsung sangat tinggi. Bangsa Indonesia untuk pertama kalinya

memilih presiden secara langsung, sehingga sebagian besar pemilih tidak menyalahgunakan hak mereka untuk memilih presiden sesuai aspirasi mereka.

Kenaikan angka partisipasi pemilih pada Pilpres dibandingkan angka partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya peningkatan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 10 persen dibandingkan jumlah pemilih terdaftar pada Pemilu Legislatif. Di samping itu, kandidat calon presiden menampilkan figur tokoh yang sudah dikenal oleh masyarakat. Masing-masing kandidat sudah mempunyai catatan (*track record*) yang diketahui masyarakat, sehingga pemilih lebih mudah untuk menentukan pilihan. Hal ini pula yang menyebabkan Pilpres 2009 dapat dilakukan dengan 1 putaran.

Salah satu kandidat dapat memperoleh suara lebih dari 50 persen plus 1 yang menjadi ketentuan untuk memenangkan Pilpres. Sedangkan Partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 berdasarkan data yang dilansir KPU sebesar 70 persen. Angka partisipasi ini menurun jika dibandingkan sebelumnya pada Pilpres 2009 dengan partisipasi sebesar 71,17 persen. Menurut data yang dihimpun KPU jumlah pemilu 2019 mencapai 199.987.870 atau setara dengan 81 persen.

### **2.3.6 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2007, 2012 dan 2017**

Sejak tahun 2005, penyelenggaraan pemilu lokal untuk memilih kepala daerah secara langsung (PILKADA) sudah dilaksanakan. Di DKI Jakarta, Pilkada baru dilaksanakan pada bulan Agustus 2007. Hal ini terkait dengan baru berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta periode 2002-2007 pada bulan September 2007. Pelaksanaan Pilkada pertama ini sangat penting, DKI Jakarta selalu dijadikan barometer politik dan

demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, persiapan Pilkada dilakukan dengan cermat dan matang. Di samping itu, pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta berkaca pula pada pengalaman penyelenggaraan Pilkada di berbagai daerah.

Berdasarkan peraturan, hanya partai politik yang memiliki 15 kursi atau lebih di DPRD yang dapat mengajukan kandidat. Partai politik yang memiliki kursi kurang dapat mengajukan calon hanya jika mereka telah memperoleh dukungan dari partai politik lainnya. Calon independen dapat mengajukan diri jika mereka telah mengumpulkan setidaknya 407.340 tanda tangan dari penduduk lokal sebagai dukungan untuk mendaftarkan pencalonan mereka ke Komisi Pemilihan Umum.

Pada pelaksanaan Pilkada 2012, terjadi dua putaran dimana putaran pertama terdapat enam kandidat Calon Gubernur-Wakil Gubernur dan pada putaran dua terdapat dua kandidat yang bersaing. Ini merupakan Pilkada ketiga bagi Jakarta yang dilakukan secara langsung menggunakan sistem pencoblosan. Jadwal pemilihan periode ini dimajukan dari jadwal pemilihan periode sebelumnya, yaitu 11 Juli karena mengikuti jadwal Pilkada Serentak gelombang kedua pada 2017. Berdasarkan peraturan, hanya partai politik yang memiliki 22 kursi atau lebih di DPRD Jakarta yang dapat mengajukan kandidat.

#### **2.3.6.1 Jumlah Pemilih Yang Terdaftar**

Pada tahun 2003, penduduk DKI Jakarta yang berhak milih tercatat sebanyak 6,7 juta orang. Sekitar 1 juta orang dihapus dari daftar pemilih karena aspek legalitas kependudukan. Seperti halnya pada saat Pemilu 2004, pada Pilkada 2007 juga terjadi keluhan dari masyarakat yang kehilangan hak pilihnya.

Berbagai pengamat menuding lemahnya sistem administrasi kependudukan menjadi penyebab banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Masyarakat yang kehilangan hak pilihnya hanya diberi peluang selama 3 hari untuk mendaftarkan diri setelah Daftar Pemilih Sementara (DPS) disebarluaskan. Penetapan waktu 3 hari yang ditetapkan oleh UU menyebabkan masyarakat tidak mempunyai waktu yang cukup luang untuk mendaftarkan diri mereka jika mereka belum terdaftar.



*Gambar 2.16 Lambang KPU Provinsi DKI Jakarta*

Sumber : Google

Jumlah pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 adalah 7.085.264 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 5.456.370 orang atau 77 persen telah menggunakan hak pilihnya. Sisanya sebanyak 1.628.894 orang atau 23 persen merupakan Golongan putih (Golput) atau tidak memilih. Menurut data KPU DKI, pada putaran pertama Pilgub DKI 2012, angka partisipasi pemilih hanya 64,6 persen.

Angka itu naik menjadi 66,8 persen pada putaran kedua Pilgub DKI 2012. Partisipasi pemilih di Pilgub DKI 2017 meningkat jauh dibandingkan gelaran serupa tahun 2012. Tahun 2017, ada 78% pemilih yang menggunakan hak suaranya pada 15 Februari 2017 dari total 7.108.589 jiwa.

### 2.3.6.2 Calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2007



Gambar 2.17 Calon Gubernur DKI Jakarta

Sumber : Google

Sampai batas akhir pendaftaran calon dan pasangan calon gubernur DKI Jakarta pada tanggal 7 Juni 2007, KPUD telah menerima delapan pasangan calon. Dua pasangan calon diusung oleh partai politik atau koalisi partai politik dan enam pasangan calon merupakan calon independen. Delapan pasangan calon tersebut adalah pasangan Adang Daradjatun–Dani Anwar dicalonkan oleh PKS, pasangan Fauzi Bowo – Prijanto diusung oleh koalisi Jakarta (gabungan 20 partai politik), calon Kwee Siong Wey maju tanpa pasangan, Mulyo Wibisono–Teddy Suratmadji, Tjuk Sugiarto–HA Widodo, Adia Munandar–Rahmadi Mamudi, Suryanto yang juga maju tanpa pasangan, serta Sarwono–Jeffrie.

Mengacu pada aturan Pilkada yang ditetapkan dalam UU No 32 tahun 2004, hanya pasangan Adang–Dani dan Fauzi–Prijanto yang memenuhi syarat *electoral threshold*. UU No 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur hanya boleh diajukan oleh partai atau koalisi partai yang memperoleh suara minimal 15 persen pada Pemilu. Undang-undang tersebut telah menghilangkan kemungkinan bagi munculnya calon independen yang bukan berasal dari partai. Dengan demikian, pasangan yang melaju ke Pilkada DKI Jakarta adalah pasangan Adang–Dani dan Fauzi–Prijanto.

Pasangan Adang–Dani melaju ke Pilkada DKI Jakarta dengan dukungan suara hasil pemilu sebesar 23 persen, sedangkan Fauzi–Priyanto mengantongi dukungan suara sekitar 76 persen suara pada Pemilu 2004. Ketetapan PKS mengusung Adang–Dani adalah untuk melawan oligarkhi politik di DKI Jakarta, di samping itu juga memberikan alternatif pilihan calon pemimpin DKI Jakarta. Fauzi Bowo adalah Wakil Kepala Daerah Incumbent yang maju sebagai calon Kepala Daerah.

Pilkada 2012 yang terjadi dua putaran dengan putaran pertama terdapat enam kandidat yaitu Fauzi Bowo–Nachrowi Ramli, Hendarji Soepandji–Ahmad Riza Patria, Joko Widodo–Basuki Tjahaja, Hidayat Nur Wahid–Didik J. Rachbini, Faisal Batubara–Biem Triani Benjamin, Alex Noerdin–Nono Sampono .Putaran kedua terdapat 2 kandidat yang lolos yaitu Fauzi Bowo–Nachrowi Ramli dan, Joko Widodo –Basuki Tjahaja. Fenomena *buzzer* politik boleh dikatakan dimulai pada Pilkada DKI Jakarta 2012 pesatnya perkembangan media sosial tanah air bertepatan dengan momentum politik di mana aktor-aktornya membutuhkan popularitas. Tak heran, *buzzer* menjadi sebuah industri yang menjanjikan. Apalagi, dinamika politik Indonesia semakin memanas pada Pilpres 2014.



Sumber : Google

Pilkada 2017 juga terjadi dua putaran, putaran pertama terdapat pasangan Agus Harimurti Yudhoyono–Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama–Djarot Saiful Hidayat, Anies Baswedan–Sandiaga Salahuddin Uno. Pada putaran kedua Agus Harimurti Yudhoyono –Sylviana Murni kalah perhitungan suara. Maka tersisa dua kandidat.



*Gambar 2.18 Pilkada DKI Jakarta*

Sumber : Google

### **2.3.6.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada DKI Jakarta**

Angka partisipasi pemilih (APP) dalam Pilkada dapat menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan Pilkada itu sendiri. APP dalam Pilkada di beberapa kota besar yaitu Surabaya, Medan dan Semarang cukup rendah yaitu 49,6 persen di kota Surabaya, 54,8 persen (kota Medan), dan 60,9 persen (kota Semarang). Berkaca pada penyelenggaraan Pilkada di kota-kota tersebut, angka partisipasi pemilih dalam Pilkada di DKI Jakarta diperkirakan rendah.

Hasil Pilkada 2007 menunjukkan bahwa angka partisipasi pemilih di DKI Jakarta mencapai 65,41 persen. Angka partisipasi ini lebih rendah dibandingkan dengan angka partisipasi pemilih pada pemilu 2004 yang mencapai 70 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa masyarakat DKI Jakarta lebih tertarik untuk menentukan pimpinan bangsa dibandingkan dengan pimpinan lokal.



Namun demikian, pada pilkada 2012 terjadi peningkatan partisipasi masyarakat menjadi 77 persen. Menurut data KPUD DKI, pada putaran pertama Pilgub DKI 2012, angka partisipasi pemilih hanya 64,6 persen. Angka itu naik menjadi 66,8 persen pada putaran kedua. Angka ini naik lagi menjadi 78 persen pada Pilkada 2017.

#### **2.3.6.4 Hasil Pilkada**

Hasil Pilkada DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2007 menetapkan pasangan Fauzi Bowo–Priyanto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012. Pasangan Fauzi Bowo–Priyanto memperoleh suara sebanyak 2.109.511 suara (57,87 persen) dan pasangan Adang Daradjatun–Dani Anwar mendapat dukungan 1.535.555 suara (42,13 persen). Pasangan Fauzi Bowo–Priyanto yang didukung oleh koalisi Jakarta tidak mampu mempertahankan 76 persen suara yang diperoleh koalisi partai tersebut pada Pemilu 2004. Sebaliknya pasangan Adang Daradjatun–Dani Anwar yang didukung oleh PKS, selain mampu mempertahankan 23 persen suara yang diperoleh pada saat Pemilu 2004 juga mampu menarik simpatisan partai lain untuk mendukung calon yang diusung PKS.

Beberapa pakar politik menyatakan bahwa rendahnya suara yang diperoleh pasangan Fauzi Bowo–Priyanto karena mesin politik dari koalisi partai pendukung tidak bekerja secara optimal. Namun, perolehan suara yang sangat signifikan dari Adang Daradjatun–Dani Anwar bukanlah semata-mata mesin partai PKS bekerja dengan sangat efektif, melainkan ada faktor lain yang ditengarai mendongkrak perolehan suara pasangan ini yaitu kekecewaan masyarakat karena tidak munculnya calon independen, kekecewaan masyarakat terhadap partai-partai



besar, dan kharisma Adang Daradjatun itu sendiri.

Kemenangan Fauzi Bowo sebagai *incumbent* wakil kepala daerah yang maju dalam pemilihan kepala daerah telah membuka babak baru dalam Pilkada. Dalam beberapa Pilkada tingkat Provinsi, *incumbent* wakil kepala daerah yang maju dalam pemilihan kepala hampir semuanya mengalami kekalahan.

Persiapan yang panjang dari Pilkada DKI Jakarta telah berbuah dengan manis, tidak ada kerusuhan selama kampanye maupun pada saat pengumuman hasil Pilkada. Semua pihak telah bersikap dewasa untuk siap menang dan siap kalah. Kubu Adang–Dani secara ksatria telah memberikan ucapan selamat kepada Fauzi Bowo–Prijanto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih. Sikap ini diikuti pula oleh para pendukung Adang-Dani yang menerima kekalahan dengan lapang dada. Kesuksesan penyelenggaraan Pilkada di DKI Jakarta, dapat menempatkan DKI Jakarta sebagai barometer politik nasional.

Pada pilkada 2012, Gubernur petahana Fauzi Bowo yang kembali mencalonkan diri harus mengikuti babak penentuan (putaran kedua) pada tanggal 20 September. Setelah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Putaran I usai, cukup mengejutkan karena menghasilkan kemenangan pasangan Joko–Basuki, sedangkan Fauzi–Nachrowi yang sebelumnya diunggulkan menang justru berada di posisi kedua.

Kejutan lainnya adalah keunggulan calon perorangan Faisal–Biem yang mampu mengalahkan Alex–Noerdin. Putaran pertama hitung cepat (*quick count*) yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menghasilkan; Foke–Nara (34,42%), Hendarji–Riza (1,85%), Jokowi–Ahok (42,85%), Hidayat–Didik (11,80%), Faisal–Biem (4,75%), dan Ale–Nono (4,41%). hasil sejumlah media cetak sehari setelah pemilu (21/9)

mengungkapkan, pasangan Jokowi–Ahok tetap unggul atas pasangan Fauzi Bowo–Nachrowi Ramli; LSI dengan (53,81%:46,19%), Ketua KPUD DKI Jakarta Dahliah Umar menyatakan, Pasangan nomor urut 3 meraih suara terbanyak dalam putaran kedua yaitu pasangan Joko --Basuki.

Pada pilkada 2017, menunjukkan hasil Agus–silvy mendapat 937.955 suara (17.06%), Ahok–Djarot mendapat 2.364.577 suara (42.99%), dan Anies–Sandi mendapat 2.197.333 suara (39.95%). Sedangkan putaran kedua Ahok–Djarot mendapat 2.350.366 suara (42.04%), dan Anies–Sandi mendapat 3.240.987 suara (57.96%).

# KRIMINALITAS

## 3.1 Umum

Kriminalitas lahir bersamaan dengan lahirnya peradaban manusia di muka bumi ini. Dalam sejarah peradaban manusia, kriminalitas sebagai kejadian pelanggaran hukum yang bersifat pidana merupakan bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat paling dominan.

Tingkat kuantitas dan kualitas kriminal juga searah dengan kemajuan peradaban manusia, semakin maju peradaban manusia, semakin meningkat pula jenis dan modus operandi tindak kejahatan. Bahkan dengan semakin meningkatnya teknologi, kejahatan juga semakin marak dilakukan dengan menggunakan alat-alat berteknologi tinggi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi dan dilakukan cukup dengan duduk di belakang layar komputer.

Banyak faktor yang memicu seseorang untuk melakukan tindak kriminal, mulai dari motivasi yang timbul pada diri seseorang sampai karena pengaruh lingkungan yang memaksa seseorang bertindak kriminal tersebut. Kriminalitas juga diyakini merupakan efek buruk dari kemajuan di berbagai bidang kehidupan dalam era globalisasi. Disamping kemajuan yang dicapai, tercipta pula kemunduran-kemunduran yang membentuk suatu kondisi terjadinya kemerosotan lingkungan sosial yang ditandai dengan sering terjadinya tindak kejahatan yang kadang melampaui batas kemanusiaan yang beradab.

## 3.2 Tindak Kejahatan

### 3.2.1 Angka Kejahatan

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Meski demikian perlu kehati-hatian dalam memaknai angka kejahatan secara umum karena merupakan aritmatika sederhana yang menggabung semua jenis kejahatan dalam perhitungan tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya (Savitz, 1978).

Polri mencatat adanya kenaikan angka tindak kejahatan yang terjadi saat memasuki bulan Juli 2020 ini atau minggu ke-28. Angkanya mencapai 10 persen lebih. Data yang dilansir Polda Metro Jaya menyebutkan, setiap bulan setidaknya terjadi 3.000 kejahatan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dari data jumlah kejahatan yang dilaporkan (*crime total*) pada tahun 2017 sebanyak 34.767 dan pada tahun 2018 sebanyak 33.628 kasus, tahun selanjutnya menjadi 31.934 kasus di tahun 2019 atau turun sekitar 1.694 kasus.

Jumlah kejahatan (*crime total*) yang dilaporkan mengalami penurunan. Penurunan jumlah kejadian yang dilaporkan pada tahun 2019 tidak bisa serta merta diartikan bahwa telah terjadi penurunan tindak kejahatan di DKI Jakarta. Sebagian korban tindak kejahatan tidak melapor ke aparat keamanan karena beberapa hal seperti malu (untuk kasus pelecehan) atau mereka enggan untuk berurusan dengan kepolisian.



Gambar 3.1 Jumlah Kejahatan di DKI Jakarta 2017 – 2019

Sejalan dengan *crime total*, tingkat resiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk DKI Jakarta mengalami penurunan selama 3 tahun, yaitu 129 tahun 2017, menjadi 113 tahun 2018, dan menjadi 103 tahun 2019. *Crime rate* merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu. Semakin tinggi angka *crime rate* maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, dan sebaliknya.

Jumlah kejahatan di Jakarta berdasarkan data dari Polda Metro Jaya dengan jenis kejahatan pembuhuhan, penganiayaan, pencurian, kebakaran, pengancaman, pemerkosaan, dan kesusilaan. Tercatat pada tahun 2017 kejahatan mencapai 6.166 kejahatan, dimana didominasi oleh jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan. Pada 2018 jumlah kejahatan menurun yaitu terjadi sebanyak 4.794 kejahatan, angka ini turun secara signifikan sekitar 22 persen.

### 3.2.2 Bentuk dan Jenis Kejahatan

Hasil penelitian dari Universitas Indonesia (UI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2016 yang dirilis pada tahun 2017 menyatakan bahwa DKI Jakarta adalah kota dengan konsumsi narkoba terbanyak di Indonesia. Hasil penelitian ini berbanding lurus dengan persentase jumlah kejahatan narkoba yang terjadi di DKI Jakarta. Dari sebanyak 31.934 kejadian kejahatan yang dilaporkan oleh Polda Metro Jaya pada tahun 2019, sebesar 19,85 % diantaranya merupakan kasus narkoba. yang disusul dengan kasus penipuan dan pencurian dengan masing-masing sebesar 16,98% dan 12,57%.

Pencurian menjadi salah satu jenis kriminalitas di Jakarta yang dianggap paling menonjol oleh Polda Metro Jaya. Tahun 2018, ada total 3.138 laporan kasus pencurian yang masuk ke kepolisian. Sedangkan tingkat kejahatan yang tinggi secara nasional yaitu jenis kejahatan internet yang mencapai angka 4390 kasus, dengan kasus yang paling banyak diadukan adalah penyebaran konten negatif, diikuti pornografi, akses ilegal, manipulasi data, peretasan, pemerasan dan perjudian.

Pihak kepolisian mencatat laporan penipuan *online* di tahun 2019 tergolong ekstrem. Menurut Polda Metro Jaya, tahun lalu kasus penipuan *online* paling banyak diadukan dengan 2.300 laporan. Modus rekayasa sosial (*social engineering*) digunakan untuk berbagai bentuk penipuan *online*, biasanya digunakan untuk melakukan pengurusan saldo rekening, kartu kredit, maupun saldo dompet digital.

Secara umum menurut Polda Metro Jaya, tren kriminalitas pencurian dengan pemberatan meningkat, karena biasa terjadi dirumah beralih ke tempat lain, juga di beberapa minimarket. Tindak pidana juga meningkat yang

terjadi di Jakarta dan sekitarnya beragam. Mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan jalanan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan trans nasional adalah kejahatan yang melewati batas Negara dan hukum suatu Negara serta berdampak besar pada suatu Negara. Contoh dari kejahatan trans nasional adalah terorisme, peredaran narkoba, perdagangan manusia dan lain sebagainya.

Tabel Jumlah Desa menurut Jenis Kejahatan, Tahun 2020

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Pencurian <i>Theft</i>	Pencurian dengan Kekerasan <i>Robbery</i>	Penipuan/ Penggelapan <i>Fraud/ Embezzlement</i>	Penganiayaan <i>Persecution</i>	Pembakaran <i>Arson</i>	Perkosaan/ Kejahatan Terhadap Kesusilaan <i>Rape/Crime Against Decency</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Seribu	2	-	-	-	-	1
Kota Jakarta Selatan	41	4	9	7	-	2
Kota Jakarta Timur	48	8	17	5	-	-
Kota Jakarta Pusat	30	7	11	4	1	2
Kota Jakarta Barat	43	15	15	7	2	2
Kota Jakarta Utara	20	4	10	7	-	2
<b>DKI JAKARTA</b>	<b>184</b>	<b>38</b>	<b>62</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>9</b>

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Penyalahgunaan/ Pengedaran Narkoba <i>Drug Abuse/ Drug Trafficking</i>	Perjudian <i>Gambling</i>	Pembunuhan <i>Murder</i>	Perdagangan Orang <i>Trafficking</i>	Korupsi <i>Corruption</i>	Tidak Ada Tindak Kejahatan <i>No Incident of Crime</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kepulauan Seribu	2	-	-	-	-	3
Kota Jakarta Selatan	12	2	2	-	1	24
Kota Jakarta Timur	8	7	4	-	6	16
Kota Jakarta Pusat	25	12	3	-	-	10
Kota Jakarta Barat	27	8	1	-	2	12
Kota Jakarta Utara	18	6	4	-	1	10
<b>DKI JAKARTA</b>	<b>92</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>75</b>

Sumber : Podes 2018

### 3.2.3 Penyelesaian Perkara

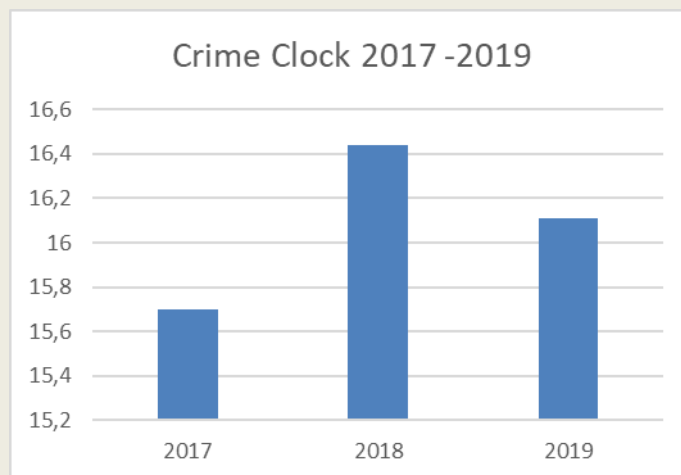
Suatu tindak kejahatan yang dilaporkan ke polisi memerlukan waktu dalam penyelesaiannya. Ada kalanya

waktu yang dibutuhkan relatif singkat, namun ada pula yang memerlukan waktu yang cukup lama. Jumlah perkara yang dapat diselesaikan oleh polisi (*Crime cleared*) selama tahun 2017-2019 menunjukkan peningkatan. Hal ini memberikan indikasi semakin profesionalnya kepolisian Indonesia untuk menyelesaikan perkara.

Pada tahun 2017, persentase penyelesaian perkara (*Clearance rate*) di Indonesia sebesar 80,75 persen, sedangkan penyelesaian kasus tahun 2018 sebesar 88,23% dan meningkat pesat. Penyelesaian kasus di tahun 2019 ini mengalami kenaikan 10 persen. Dari 33.628 total kejahatan yang terjadi di tahun 2018, kasus yang diselesaikan mencapai 29.528 kasus atau setara dengan 98 persen penyelesaian.

### 3.2.4 Selang Waktu Terjadinya Tingkat Kejahatan (*crime clock*)

Indikator ini mengindikasikan selang waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan kejahatan yang lain. Semakin besar nilai *crime clock* mengindikasikan bahwa kejadian tindak pidana semakin jarang terjadi. Bertambah lamanya selang waktu terjadinya tindak pidana menjadi salah satu sasaran pokok yang akan dicapai dalam upaya



Gambar 3.2 Crime Clock 2017 - 2019



meningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas.

*Crime clock* pada tahun 2017 yaitu 15 menit 7 detik, tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 16 menit 44 detik, dan menjadi 16 menit 11 detik pada tahun 2019. Artinya pada tahun 2019 setiap 16 menit 11 detik terdapat 1 kasus kejahatan. Interval kejadian kejahatan ini tidak memperhitungkan tingkat keseriusan kejahatannya. Data diambil dari seluruh jenis kejahatan, mulai dari kejahatan terhadap nyawa, hingga kejahatan terhadap ketertiban umum.

### **3.2.5 Waktu Kejadian Tindak Kejahatan**

Apabila dikaitkan dengan selang waktu kejadian, setiap jam di DKI Jakarta terjadi kejahatan. Peluang masyarakat DKI Jakarta untuk terkena tindak kejahatan cukup tinggi kapanpun waktunya. Semakin malam, semakin banyak kejahatan yang terjadi. Hal ini sangat wajar, karena pada malam hari sebagian masyarakat DKI Jakarta sedang beristirahat dan kewaspadaan terhadap tindak kejahatan mulai menurun.

## **3.3 Tindakan Pengamanan**

### **3.3.1 Upaya Menjaga Keamanan**

Instrumen yang paling penting dalam upaya penegakan hukum dan ketertiban umum adalah aparat keamanan. Di setiap Kabupaten/Kota terdapat Polres, dan setiap kecamatan terdapat Polsek. Pemerintah DKI Jakarta juga memastikan bahwa Jakarta aman terkendali dan seluruh aparat kepolisian, Kodam, Satpol PP, dan aparatur pemerintah, semua dalam posisi siap. Sehingga masyarakat lebih mudah untuk melaporkan kejadian kejahatan dan semakin merasa aman.

Tabel. Banyaknya Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Selama Setahun Terakhir, 2018

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Pembangunan/ Pemeliharaan Post Keamanan Lingkungan <i>Buliding/ Maintenance Security Post</i>	Pembentukan/ Pengaturan Regu Keamanan <i>Establishing Security Guard</i>	Penambahan Jumlah Anggota Hansip/Linmas <i>Raising Civil Defense/Civil Protection Personnel</i>	Pelaporan Tamu Mengingat Lebih dari 24 Jam <i>Reporting Guests Staying More Than 24 Hours</i>	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga <i>Activation of Security System from Citizen Initiative</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	-	1	-	3	5
Kota Jakarta Selatan	44	46	26	60	60
Kota Jakarta Timur	54	50	26	62	50
Kota Jakarta Pusat	25	35	17	41	38
Kota Jakarta Barat	38	40	31	45	42
Kota Jakarta Utara	29	27	25	31	31
<b>DKI JAKARTA</b>	<b>190</b>	<b>199</b>	<b>125</b>	<b>242</b>	<b>226</b>

Tabel. Banyaknya Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi atau Akses Ke Pos Polisi Terdekat Selama Setahun Terakhir, 2018

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Pos Polisi (Termasuk Polsek, Polres, dan Polda) <i>Police Station (Includes Sector Police, Resort Police, and Regional Police)</i>			Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kelurahan yang Tidak Ada Pos Polisi) <i>The Ease of Access to Nearest Police Station (For Village/Sub- District That Not Having Police Station)</i>		
	Ada <i>Available</i>	Tidak Ada <i>Not Available</i>	Sangat Mudah <i>Very Easy</i>	Mudah <i>Easy</i>	Sulit <i>Difficult</i>	Sangat Sulit <i>Very Difficult</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Seribu	6	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Selatan	43	22	14	8	-	-
Kota Jakarta Timur	65	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Pusat	39	5	2	3	-	-
Kota Jakarta Barat	42	14	11	3	-	-
Kota Jakarta Utara	27	4	3	1	-	-
<b>DKI JAKARTA</b>	<b>222</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Salah satu implementasi peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kriminalitas adalah dengan cara yang konvensional. Mendirikan Pos Siskamling, memeriksa setiap warga dari luar Desa/Kelurahan, dan membentuk Regu Keamanan, menambah Jumlah Hansip/Linmas adalah cara-cara konvensional tersebut. Kewaspadaan dan sikap proaktif masyarakat dapat mengurangi intensitas kejahatan sekaligus meringankan beban kepolisian. Upaya proaktif masyarakat persentase Kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan di DKI, pembentukan regu keamanan lingkungan merupakan upaya yang paling banyak dilakukan.

Dilihat berdasarkan wilayah, Kota Administrasi Jakarta Utara adalah kota yang paling hampir seluruh kelurahannya melakukan berbagai upaya untuk pengamanan lingkungan. Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, upaya pengamanan yang dilakukan oleh sebagian besar kelurahan adalah memeriksa warga dari desa lain. Sekitar 90,64 persen kelurahan melakukan hal tersebut. Sedang upaya lainnya kurang populer dilaksanakan di wilayah ini, hal ini terkait dengan lokasinya yang relatif aman.

Tindakan kejahatan yang paling banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah pencurian, sekitar 38 persen kelurahan di DKI Jakarta pernah terjadi pencurian. Tindakan kejahatan yang relatif jarang terjadi adalah penjarahan, pembakaran dan pemerkosaan. Seluruh kelurahan menyatakan tidak pernah terjadi perdagangan manusia (human trafficking). Hal ini dimungkinkan karena ketidaktahuan aparat kelurahan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perdagangan manusia terjadi pula di DKI Jakarta walaupun korbannya belum tentu penduduk DKI Jakarta.

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



***BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI DKI JAKARTA***

Jl. Salemba Tengah No.36-38 , Paseban,  
Senen, Jakarta Pusat 10440

Telepon (021) – 31928493 , Fax (021)-3152004

Email : [bps3100@bps.go.id](mailto:bps3100@bps.go.id) ; Homepage : <https://jakarta.bps.go.id>